



PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN III TAHUN **2024**

PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TRIWULAN III TAHUN 2024
(Periode Survei bulan Juli - September)

berdasarkan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas



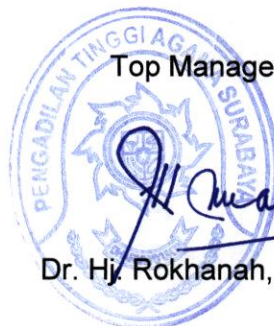
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
2024

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023

Disahkan di Surabaya
pada hari Jumat, 04 Oktober 2024



Top Management,

Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Sekretaris Tim Survei,

Benny Hardiyanto, S.H.

Ketua Tim Survei,

H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama pada Triwulan III Tahun 2024 (periode survei bulan Juli – September) dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 sekaligus menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 4 April 2023 Nomor 1098/DjA.1/HM.00/4/2023 perihal Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi.

Survei ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas dari korupsi. Kepuasan penerima layanan dalam hal tingkat persepsi korupsi dapat dijelaskan/ diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/ diharapkan.

Pelaksanaan dan laporan survei ini masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan prima terhadap pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Demikian laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Surabaya, 04 Oktober 2024

Ketua Tim Survei,



H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H. 9

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan tekad untuk menciptakan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Surabaya berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Guna mengukur tingkat persepsi korupsi dalam pelayanan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan III Tahun 2024 (Periode Survei bulan Juli – September). Pelaksanaan survei ini merupakan wujud kepatuhan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Survei ini bertujuan untuk memetakan persepsi pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Laporan survei ini memuat hasil evaluasi pelayanan publik dan persepsi korupsi mengenai pelayanan publik dan persepsi korupsi dalam pelayanan yang diberikan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap 205 responden yang dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi Survelag Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) meliputi 5 (lima) indikator, antara lain:

- a. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,84;
- b. Tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,83;
- c. Tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,83;
- d. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,85;
- e. Tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,86.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis dalam persepsi korupsi Triwulan III Tahun 2024, didapati nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,84 atau nilai interval konversi sebesar 96,05 yang tergolong dalam kategori mutu pelayanan A (bersih dari korupsi). Melalui hasil survei ini, diharapkan agar menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di masa mendatang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR DIAGRAM	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I KUESIONER SURVEI	1
BAB II METODOLOGI SURVEI	5
A. Kriteria Responden	5
B. Metode Pencacahan	5
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis	7
BAB III PENGOLAHAN SURVEI	9
A. Analisis Hasil Survei	9
B. Tindak Lanjut Hasil Survei	19
BAB IV DATA SURVEI	21
A. Data Responden	21
B. Data dukung Lainnya	41
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Rekomendasi	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Morgan dan Krecjie	6
Tabel 2 Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi	8
Tabel 3 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	9
Tabel 4 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan	11
Tabel 5 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur	12
Tabel 6 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/	14
Tabel 7 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar	15
Tabel 8 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara	17
Tabel 9 Kesimpulan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II Tahun 2024	18
Tabel 10 Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	18
Tabel 11 Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	22
Tabel 12 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan	35
Tabel 13 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 14 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan	37
Tabel 15 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan ..	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	10
Grafik 2 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan.....	11
Grafik 3 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur.....	12
Grafik 4 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/	14
Grafik 5 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar	16
Grafik 6 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara	17
Grafik 7 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	35
Grafik 8 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
Grafik 9 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38
Grafik 10 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan..	40

DAFTAR DIAGRAM

Gambar 1 Identitas Responden pada Aplikasi Survelag Ditjen Badilag.....	21
Gambar 2 Data Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Identitas Responden pada Aplikasi Survelag Ditjen Badilag.....	21
Gambar 2 Data Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	41

BAB I KUESIONER SURVEI**A. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Salah satu bentuk komitmennya berupa pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan III Tahun 2024 (Periode Survei bulan Juli – September) yang menghasilkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menitikberatkan pada 2 (dua) sasaran, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selalu berupaya untuk selalu memberikan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan berupaya untuk dapat menjadi contoh bagi satuan kerja lain. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menyelenggarakan kegiatan dan layanan sesuai dengan prosedur dan standar yang ada, serta telah terbebas dari praktik korupsi, yang diantaranya dapat dilihat dari potensi pelaksanaan suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pencari keadilan, menilai tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya, serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

B. Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah peraturan perundangan, sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2024;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019; dan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan dan layanan yang telah diselenggarakan sekaligus sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Adapun Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya korupsi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
4. Menilai efektifnya program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi;
5. Membantu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengevaluasi dan menyusun strategi dan program aksi lanjutan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas

institusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

D. Sasaran

Adapun sasaran dari penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini, antara lain:

1. Terselenggaranya pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang bersih, akuntabel, dan transparan;
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai yang diharapkan oleh pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta anti gratifikasi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

F. Manfaat

Dengan tersedianya data dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara periodik, maka dapat diperoleh manfaat:

1. Mengetahui kelemahan/ kekurangan dari masing-masing unsur/ indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan; dan
4. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

G. Unsur/ Indikator Penilaian

Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 yang memuat 5 (lima) unsur/ indikator, antara lain mencakup aspek integritas, tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan di luar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan.

H. Kuesioner Survei

Kuesioner survei yang disusun untuk mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, sebagai berikut:

1. Bagian I: Identitas Responden, meliputi
 - a. Nama responden;
 - b. Nomor ponsel responden;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Usia;
 - e. Pekerjaan;
 - f. Pendidikan; dan
 - g. Jenis layanan
2. Bagian II: Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Pelaksanaan survei ini menggunakan kuesioner sebagai alat bantu untuk pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan. Kuesioner *online* melalui *link* <https://survei.badilag.net/> terdiri dari 5 (lima) unsur pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan peradilan. Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan (nilai 1 – 6) yang dapat dijabarkan, sebagai berikut:

- a. Diberi nilai 1 (tidak sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, tahapan terlalu banyak sehingga prosesnya tidak efektif;
- b. Diberi nilai 2 (tidak jelas), jika pelaksanaan prosedur pelayanan tidak ada, alurnya tidak mudah, tahapan terlalu banyak sehingga prosesnya tidak efektif;
- c. Diberi nilai 3 (kurang jelas), jika pelaksanaan prosedur pelayanan ada namun belum jelas arah alurnya sehingga prosesnya tidak efektif;
- d. Diberi nilai 4 (kurang efektif), jika pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum memuaskan sehingga prosesnya belum efektif;
- e. Diberi nilai 5 (sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit namun masih perlu diefektifkan; dan
- f. Diberi nilai 6 (sangat sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat memuaskan, sangat sederhana sehingga prosesnya mudah dan efektif.

BAB II METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Responden adalah penerima pelayanan publik yang telah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggaraan pelayanan. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap responden yang datang ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maupun website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun yang menjadi kriteria survei, yaitu satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan masyarakat/ *stakeholder* yang mendapatkan manfaat pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan jenis layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, antara lain:

1. Layanan pembinaan dan pengawasan;
2. Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan;
3. Layanan penyelesaian perkara; dan
4. Layanan penyerahan produk pengadilan.

Kriteria responden yang diambil mencakup variasi yang cukup dari karakteristik masyarakat, seperti jenis layanan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan guna memastikan bahwa hasil survei dapat mewakili seluruh pengguna dengan baik.

B. Metode Pencacahan

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 1 (satu) variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Variabel pada pengukuran ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 yang meliputi aspek diskriminasi pelayanan, pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan, permintaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan/ perantara.

Deskripsi kuantitatif sendiri bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Survei ini menggunakan tabel Morgen dan Krejcie sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat:

Tabel 1 Tabel Morgan dan Krejcie

Tabel Morgan & Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357

Sementara teknik yang digunakan dalam pemilihan responden survei ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian atau survei yang dilakukan. Dalam hal ini, responden yang dipilih adalah pengguna layanan yang telah menggunakan layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir. Dengan demikian, diharapkan responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan survei yang dilakukan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

1. Pengolahan Data

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dihitung melalui aplikasi Survelag Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dapat diakses melalui alamat [link https://survei.badilag.net/](https://survei.badilag.net/) dengan menggunakan “nilai rata-rata” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap 5 (lima) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama sebagaimana rumus berikut:

$$\text{SPAK} = \frac{\text{Total jumlah bintang}}{\text{Jumlah responden} \times 30} \times 4$$

Untuk nilai persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Persentase SPAK} = \frac{\text{Total jumlah bintang}}{4} \times 100\%$$

2. Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi kualitas pelayanan menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala Likert dengan penilaian antara 1 – 6, di mana nilai 1 merupakan skor persepsi terendah (tidak sesuai), sementara nilai 6 merupakan skor persepsi tertinggi (sangat sesuai) dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani (semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang diberikan).

Metode analisis yang digunakan dalam survei ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu jenis analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, menampilkan, dan meringkas sekumpulan data sehingga lebih mudah dipahami. Alat kerja deskriptif yang digunakan untuk mendapatkan nilai indeks persepsi kualitas pelayanan menggunakan statistik sederhana, yaitu dengan merata-ratakan skor yang diberikan responden atas pertanyaan survei.

Adapun nilai interval persepsi kualitas pelayanan dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPAK	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Bersih dari Korupsi

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

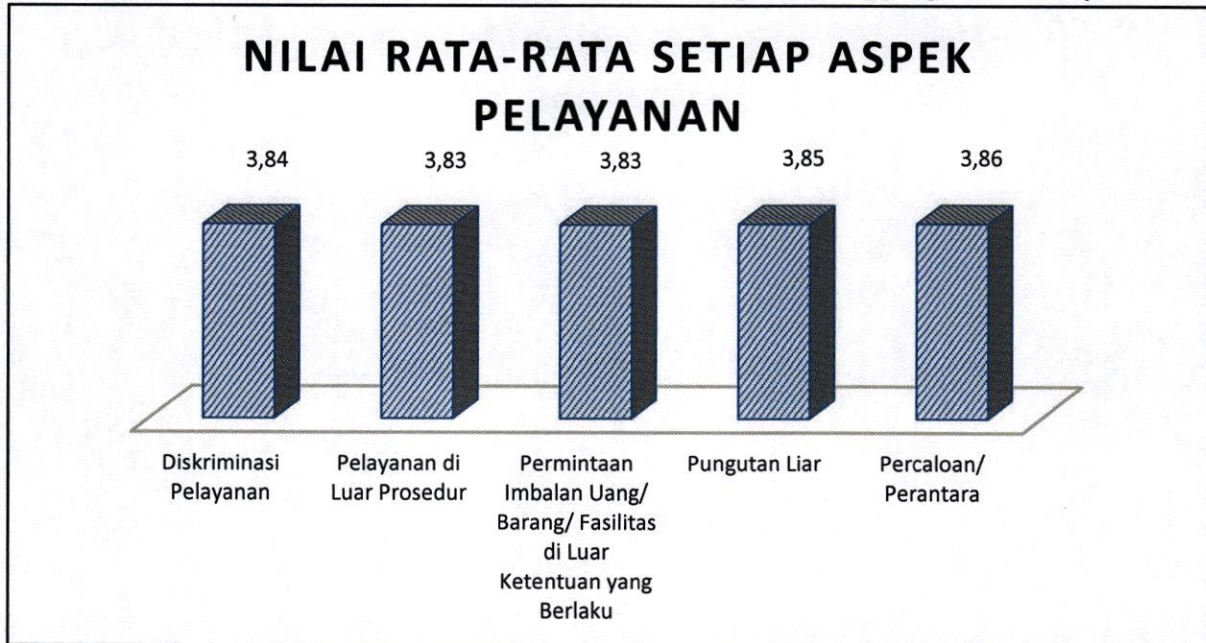
Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 205 responden. Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai rata-rata tertimbang Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,84 dengan nilai konversi sebesar 96,05 dan berada pada kategori **"SANGAT BAIK"**. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) diolah secara deskriptif untuk membantu menggambarkan kualitas dengan menghubungkan angka-angka dan variabel penilaian. Adapun nilai rata-rata setiap aspek pelayanan dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

	Unsur Pertanyaan	Nilai	Kategori	Peringkat
U1	Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3,84	Bersih dari Korupsi (A)	3
U2	Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3,83	Bersih dari Korupsi (A)	4
U3	Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	3,83	Bersih dari Korupsi (A)	5
U4	Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	3,85	Bersih dari Korupsi (A)	2
U5	Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini	3,86	Bersih dari Korupsi (A)	1
	Rata-rata Tertimbang	3,84	Sangat Baik (A)	-

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 1 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 (lima) unsur pelayanan, terdapat unsur pelayanan yang memiliki kualitas pelayanan sangat baik, yaitu percaloan/ perantara. Sedangkan unsur pelayanan yang memiliki kualitas pelayanan paling rendah, yaitu (1) pelayanan di luar prosedur dan (2) permintaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku. Di bawah ini merupakan analisis data hasil masing-masing aspek pelayanan dapat dijabarkan, sebagai berikut:

1. Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,84. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

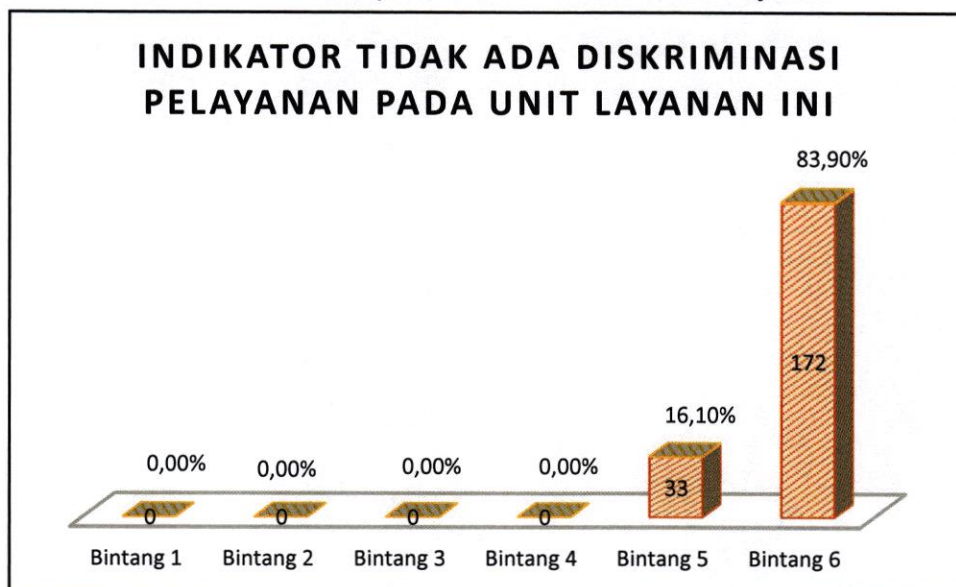
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	33	16,10%
★ ★ ★ ★ ★ ★	172	%83,90
Jumlah	205	100,00%
Indeks		3,84

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,84. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 172 responden (83,90%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebagai pengguna layanan menganggap bahwa petugas layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memberikan layanan tidak membedakan berdasarkan faktor identitas tertentu yang bersifat subjektif. Selain itu, sejumlah 33 responden (16,10%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek kesamaan perlakuan terhadap pengguna layanan masih perlu ditingkatkan agar lebih memenuhi kebutuhan pengguna layanan.

2. Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/ prosedur, pengurangan denda, dll. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan menunjukkan hasil pada indeks 3,83. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

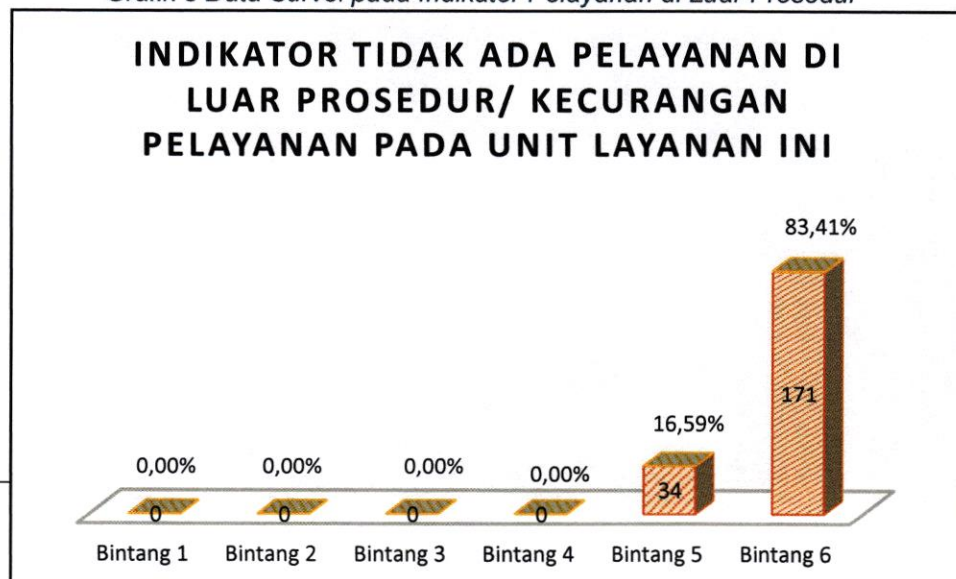
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	34	16,59%
★ ★ ★ ★ ★ ★	171	83,41%
Jumlah	205	100,00%
Indeks		3,83

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,83. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 171 responden (83,41%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, sejumlah 34 responden (16,59%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek tidak adanya kecurangan pelayanan masih perlu untuk ditingkatkan lagi.

3. Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/ bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, *resort* perjalanan/ jasa transport, komunikasi, hiburan, *voucher* belanja, dll) di luar ketentuan. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,83. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

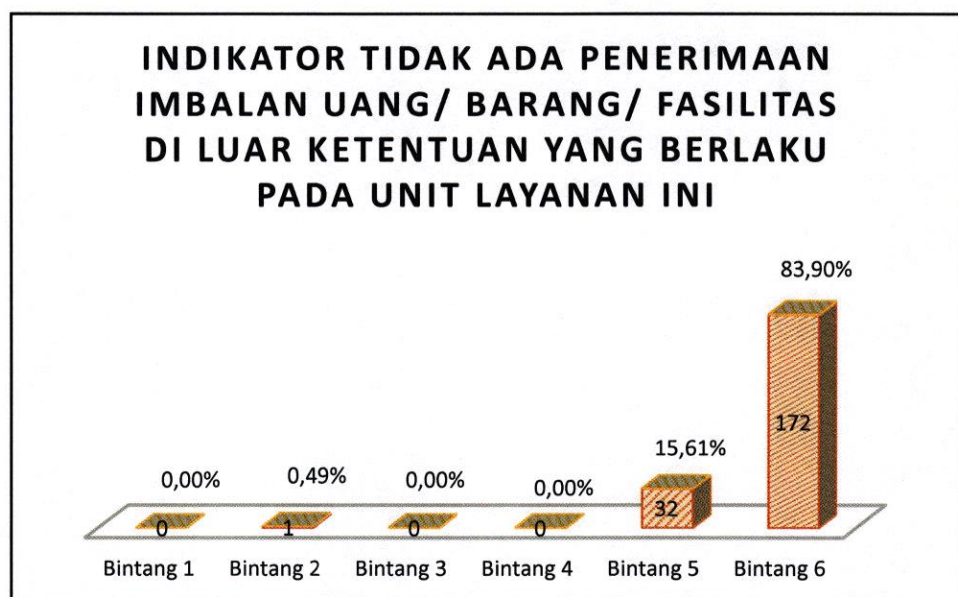
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	1	0,49%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	32	15,61%
★ ★ ★ ★ ★ ★	172	83,90%
Jumlah	205	100,00%
Indeks		3,83

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 4 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini berada pada angka 3,83. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 172 responden (83,90%) memberikan skor bintang 6 pada tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sementara itu, sejumlah 32 responden (15,61%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek tidak ada

imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan masih perlu ditingkat lagi. Sementara 1 responden (0,49%) memberikan skor bintang 2 pada tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.

4. Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli) bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,85. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

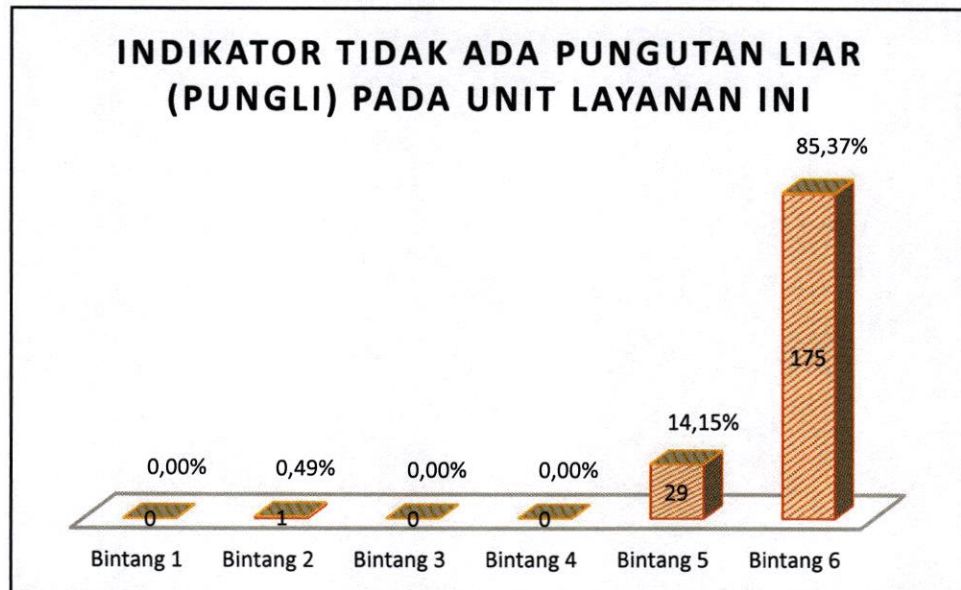
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator jangka waktu penyelesaian pelaksanaan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	1	0,49%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	29	14,15%
★ ★ ★ ★ ★ ★	175	85,37%
Jumlah	205	100,00%
Indeks		3,85

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 5 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,85. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 175 responden (85,37%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sementara itu, sejumlah 29 responden (14,15%) memberikan skor bintang 5 yang mengindikasikan bahwa sebagian kecil responden belum sepenuhnya setuju bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) terhadap layanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sementara itu sejumlah 1 responden (0,49%) memberikan skor bintang 2 pada indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.

5. Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Informasi ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan yang dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/ atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,86. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

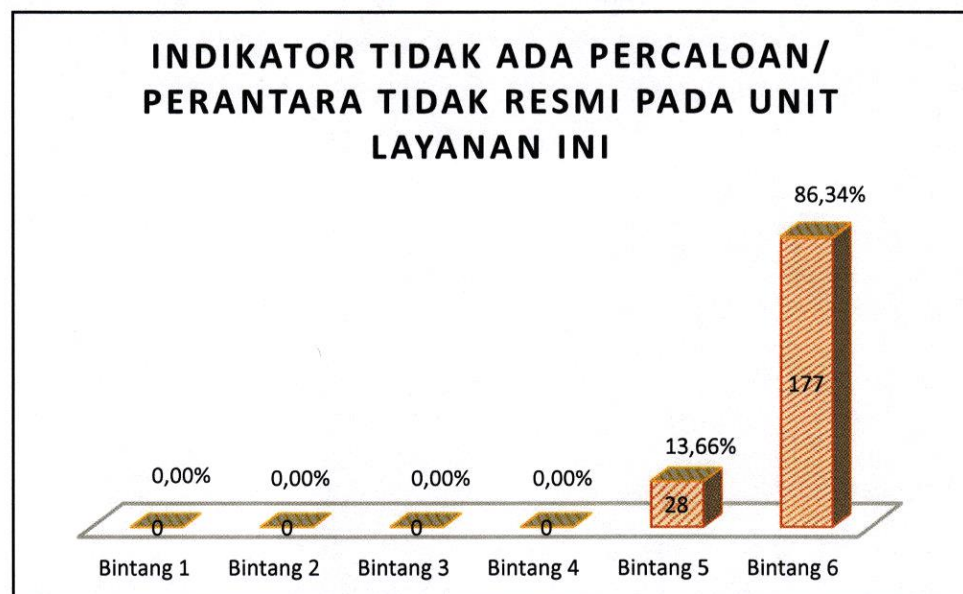
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tarif/ biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan tarif/ biaya yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	28	13,66%
★ ★ ★ ★ ★ ★	177	86,34%
Jumlah	205	100,00%
Indeks		3,86

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 6 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,86. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 177 responden (86,34%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selain itu, sejumlah 28 responden (13,66%)

memberikan skor bintang 5 yang dapat diartikan bahwa aspek tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada pelayanan masih tetap perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan III Tahun 2024 (periode survei bulan Juli – September) dapat disimpulkan, sebagai berikut:

Tabel 9 Kesimpulan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No	Kesimpulan	Keterangan
1	Nilai SPAK	3,84 dengan nilai konversi 96,05
2	Kategori	Bersih dari Korupsi
3	Unsur Terendah	U2: Pelayanan di Luar Prosedur U3: Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku
4	Unsur Tertinggi	U5: Pungutan Liar
5	Prioritas Perbaikan	U2: Pelayanan di Luar Prosedur U3: Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku

Guna memotivasi dan memperbaiki kinerja pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka masukan/ opini/ pandangan masyarakat/ *stakeholder* sangat diperlukan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat/ *stakeholder*. Masukan dan pandangan pengguna layanan pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10 Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No.	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
1	Pelayanan yang diberikan sudah baik, terus tingkatkan
2	Pelayanan sudah baik, untuk kedepan terus mempertahankan pelayanan tersebut
3	Pertahankan pelayanan yang sudah baik, semoga PTA Surabaya dapat menjadi contoh/ <i>role model</i> untuk satuan kerja dibawahnya
4	Teruskan pelayanan yang sudah optimal

No.	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
5	Pelayanan di PTA Surabaya sangat luar biasa, mencerminkan komitmen terhadap kualitas dan kepuasan masyarakat. Semoga terus berkembang dan semakin maju di masa mendatang
6	Website sbg media informasi agar lebih aman dapat menggunakan SSL <i>protect</i> sehingga terhindar dari <i>phising</i> , <i>malware</i> ataupun <i>virus inject</i>
7	Sudah bagus, hanya perlu menjaga konsistensi kualitas dan kompetensi kalau bisa <i>diupgradel</i> ditingkatkan lagi
8	Layanan di PTA Surabaya sudah sangat baik dan perlu ditingkatkan
9	Sangat bagus, dipertahankan dan bisa ditingkatkan dengan inovasi-inovasi baru
10	Pelayanan sudah sangat baik, tetap dipertahankan

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Pelaksanaan hasil survei yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan III Tahun 2024 (periode survei bulan Juli – September) didapatkan hasil survei sebesar 96,05 dengan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 3,84 yang termasuk dalam kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”**. Dari 5 (lima) unsur/ indikator, terdapat nilai unsur tertinggi, yaitu pada unsur percaloan/ perantara dengan nilai 3,86 sementara unsur pelayanan di luar prosedur dan permintaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku memperoleh nilai unsur terendah, yaitu sebesar 3,83.

Meskipun sebagian besar responden memberikan skor dan rata-rata yang tinggi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), namun terdapat beberapa catatan analisis yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan layanan agar pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya semakin optimal dan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dapat terus meningkat.

Tindak lanjut tersebut juga diperlukan guna mewujudkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang salah satu arahnya adalah kondisi birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut merupakan tindak lanjut yang harus dilaksanakan berdasarkan pada analisis hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), antara lain:

1. Melakukan supervisi terhadap petugas PTSP agar pelayanan petugas PTSP sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan pelayanan, terutama pada aspek kesamaan perlakuan terhadap pengguna layanan; dan
3. Evaluasi terhadap dokumentasi tertulis atas pelayanan yang diberikan oleh petugas layanan yang menggambarkan kesesuaian pelaksanaan layanan dengan prosedur yang ditetapkan.

Setelah melakukan tindak lanjut, pihak unit layanan harus memantau dan mengevaluasi kembali kinerja untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan efektif dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Secara keseluruhan, tindak lanjut hasil survei harus melibatkan tindakan konkret yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit layanan tersebut. Hal ini penting agar kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

BAB IV DATA SURVEI

A. Data Responden

Responden ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan III Tahun 2024 (periode survei bulan Juli – September) diikuti oleh 205 responden yang seluruhnya merupakan pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun data dari para responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Triwulan III Tahun 2024 (periode survei bulan Juli – September), sebagai berikut:

Gambar 1 Identitas Responden pada Aplikasi Survelag Ditjen Badilag

survei.badilag.net/home/response

SURVELAG Dashboard Survei

Survei
Halaman 1 Survei

SI SURTI (SISTEM SURVEI TERINTEGRASI)

Layanan Data Responden Form Kuisioner Kritik & Saran

Identitas Responden
Kami menjamin kerahasiaan data pribadi anda

Nama Responden NIK (Nomor Identitas) Nomor Ponsel Responden
contoh : 08xxx

Email Jenis Kelamin Usia
Pilih Jenis Kelamin Pilih usia

Pekerjaan Pendidikan
Pilih pekerjaan Pilih pendidikan

☐ Bahwa saya mengisi data ini dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

< Kembali Selanjutnya >

Tabel 11 Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
1	Eko	08*****1657	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Karyawan Swasta	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
2	Masruroh, S.Hum.	08*****0504	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Karyawan Honorer	Layanan pembinaan dan Pengawasan
3	Meidiyanti Putri Rahmadini, A.Md.A.B.	08*****5486	Akademi/ Diploma	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
4	Suyitno, S.H., M.H.	08*****7976	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
5	Belinda Dwi Tamara, S.H.	08*****3088	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
6	Brava Moslem, S.Kom.	08*****0802	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
7	Afief Ryan Nugraha, S.H.	08*****9721	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Industri	Layanan penyelesaian perkara
8	Mohammad Hazin	08*****0161	SLTA/SMA/Sederajat	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
9	Kharisma Dienna Sakhofi, A.Md.	08*****5719	Akademi/ Diploma	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
10	Fatimah Zahroh, A.Md.	08*****2932	Akademi/ Diploma	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
11	Muhsinah binti Abdul Mukti	08*****1172	SLTA/SMA/Sederajat	Wanita	Mengurus Rumah Tangga	Layanan penyerahan produk pengadilan
12	Nur Airin	08*****9907	SLTA/SMA/Sederajat	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
13	Intan Pradista, A.Md.	08*****1124	Akademi/ Diploma	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
14	Abdul Hadi Hidayatullah, S.H.I., M.H.	08*****0676	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Karyawan Honorer	Layanan penyelesaian perkara
15	Halimatus S binti Hayyi	08*****4993	SLTA/SMA/Sederajat	Wanita	Mengurus Rumah Tangga	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
16	Zaenul Yusufi, S.H.I.	08*****7408	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
17	Wildany El Kautsar	08*****0806	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Karyawan Honorer	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
18	Didik Wahyu Saputra, S.T.	08*****6510	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
19	Moh. Syaifuddin, S.H., M.H.	08*****1401	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
20	Mayah Alkarim binti H. Romli	08*****5017	SLTA/SMA/Sederajat	Wanita	Petani/ Pekebun	Layanan penyelesaian perkara
21	Muhammad Faiq Rohmatillah, S.H.	08*****9545	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
22	Ana Susanti, S.H.I., M.H.	08*****9885	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
23	Serian Wahyu Wijanarko, A.Md.	08*****7326	Akademi/ Diploma	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
24	Miftahul Rohman bin Satukan	08*****2755	SLTA/SMA/Sederajat	Laki-laki	Pedagang	Layanan penyelesaian perkara
25	Hadi Sasono	08*****2225	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Karyawan Honorer	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
26	Shohib Hasan, S.H.I., M.H.	08*****7475	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
27	Jani, S.H.	08*****4512	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
28	Ridho Firmansyah, S.H., M.H.	08*****0028	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
29	Ratna Bumulo, S.Ag.	08*****1499	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
30	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom.	08*****6771	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
31	Edward Firmansyah, S.H.	08*****6596	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
32	Rezza Haryo Nugroho, S.H.	08*****5861	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
33	M. Ali Mahfud, S.H.I.	08*****7924	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
34	Drs. Sutipno	08*****5977	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
35	Mun Farida, S.H., M.H.	08*****0265	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
36	Merinta Prameswari, S.A.	08*****2331	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
37	Dini Herawati, S.E., S.H.	08*****7478	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
38	M. Farchan Murod, S.Kom.	08*****8624	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
39	Amron Nasrul Huda, S.H., M.Hum.	08*****3379	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
40	Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.	*****4746	Strata-3 (S3)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
41	Fauzin Rifai, S.H.	08*****2441	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
42	H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.	08*****1711	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
43	Nandayu Anisa Ajitrisnani, S.T.	08*****1001	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
44	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	08*****5433	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
45	Dedy Rukmono, S.H., M.H.	08*****2930	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
46	Oktavia Putri Silvana	08*****3042	SLTA/SMA/Sederajat	Wanita	Belum/ Tidak Bekerja	Layanan penyelesaian perkara
47	Maya Kusuma	08*****5938	SLTA/SMA/Sederajat	Wanita	Belum/ Tidak Bekerja	Layanan penyelesaian perkara
48	Silvi Ritmadhanti Ziyanna, S.E., S.H.	08*****0187	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
49	Arifin	08*****5629	Akademi/ Diploma	Laki-laki	Pensiun	Layanan penyelesaian perkara

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
50	Moh. Daroini, S.H., M.H.	0*****4212	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Lainnya	Layanan penyelesaian perkara
51	Sriati	08*****1809	SLTA/SMA/Sederajat	Wanita	Pedagang	Layanan penyelesaian perkara
52	Jimmy Jannatin, S.H.I.	08*****9027	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
53	Drs. Zainal Arifin, M.H.	0*****1560	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Lainnya	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
54	Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.	08*****4077	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
55	Kartika Anggi Nugrahini, S.H.	08*****0114	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
56	Bayu Purna Safroni, S.H.I., M.H.	08*****6135	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
57	Samsul Arifin	08*****7321	SLTA/SMA/Sederajat	Laki-laki	Karyawan Swasta	Layanan penyelesaian perkara
58	Mihdar, S.Ag., M.H.	08*****2314	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
59	Syafik'udin, S.H.		Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
60	Alwie, S.H.	08*****2278	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
61	Amir Hamzah, S.H.	08*****4909	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
62	Syafik'udin,SH	08*****2518	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
63	Imam Rahmawan Widiyanto, S.H., M.H.	08*****1999	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
64	Rini Wulandari, S.H., M.H.	08*****5541	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
65	Mashuri, S.Ag	08*****0707	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
66	Ahdiyat Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H.	08*****3777	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
67	Nanang Santoso	08*****0114	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Mekanik	Layanan penyelesaian perkara
68	Drs. Sutipno	08*****5977	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
69	Rofii, S.H., M.H.	08*****4462	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
70	Anita Nurhikma, S.H., M.Hum.	08*****7979	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
71	Ahmad Muhammad Nuruzzaman Afifi, S.E.	08*****4678	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
72	Ahmad Muhammad Nuruzzaman Afifi, S.E.	08*****4678	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
73	Dra. Hj. Noor Asiah	08*****5337	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
74	Drs. Dulloh, S.H., M.H.	08*****2581	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
75	Achmad Walif Rizqy, S.H.	08*****1345	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
76	Niken Ayuni Lestari	08*****0761	SLTA/SMA/Sederajat	Wanita	Belum/ Tidak Bekerja	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
77	Ahmad Ainul Yaqin	08*****8677	SLTA/SMA/Sederajat	Laki-laki	Karyawan BUMN	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
78	Wahyu Indah Rahmawati, A.Md.	08*****0453	Akademi/ Diploma	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
79	Intan Pratiwi, S.E.	08*****5340	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
80	Salma Nurkhafidoh, S.Kom.	08*****7472	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
81	Ana Khoirotul Aini, S.H.	+6*****6659	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
82	Slamet Wulyono	08*****8654	SLTA/SMA/Sederajat	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
83	Wiwini Sulistiyawati, S.H., M.H.	08*****3605	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
84	Ery Handini, S.H., M.H.	08*****4682	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
85	xxx	xxxxx	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
86	XXXX	08*****5966	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
87	Nanda Eka Puspita, A.Md.	08*****7081	Akademi/ Diploma	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
88	Diah Wijayanti, S.H.	08*****9681	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
89	R. Khairani	08*****3968	SLTA/SMA/Sederajat	Wanita	Lainnya	Layanan pembinaan dan Pengawasan
90	Rima Titianingtyas, A.Md.	08*****6132	Akademi/ Diploma	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
91	Akhmad Faruq, S.H.	08*****7100	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
92	Sri Juhana, S.Kep.	08*****5666	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
93	Farida Pitaloka, A.Md.	08*****1229	Akademi/ Diploma	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
94	Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H., M.HES.	08*****5408	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
95	Amsaliya Khurun Ainun, S.H., M.H.	08*****3197	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
96	Siti Artaniyah, S.Ag.	08*****0149	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
97	Rozy Alifian Mukhtar, S.H., M.Kn.	08*****2338	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
98	Niken Retno Hastuti, S.Akun.		Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Lainnya	Layanan pembinaan dan Pengawasan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
99	Mohammad Faried Dzikrullah, S.H., M.H.	08*****3662	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
100	Junaidi Syampurno, S.H.	08*****2247	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
101	Fahrudin, S.Ag., M.H.	08*****6618	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
102	Buyung Tumanggor, S.Kom.	08*****9833	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
103	Tamaji, S. Ag., M.H.	08*****7039	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
104	Tedy Agastya Dwi Permana, S.Kom.	08*****3213	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
105	H. Khadimul Huda, S.H, M.H.	08*****7918	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
106	Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES.	0*****4561	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
107	Fathul Mubin, S.H.I.	08*****2599	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
108	Drs. Mashudi	0*****3127	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
109	Dra. Hj. Dyah Kholidah Nur'aini	0*****0096	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
110	Hj. Ryana Marwanti, S.H., M.H.	0*****6916	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
111	Ratna Nur Mufida, A.Md.	08*****0200	Akademi/ Diploma	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
112	H. Sofan Affandi, S.H., M.H.	08*****2950	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
113	Safara Rizki Dwitasari, S.H.	08*****5121	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
114	Safara Rizki Dwitasari, S.H.	08*****5121	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
115	Safara Rizki Dwitasari, S.H.	08*****5121	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
116	Safara Rizki Dwitasari, S.H.	08*****5121	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
117	H. Hadiyatullah, S.H.	08*****3574	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
118	Samina Laela, S.E., S.H. M.H.	08*****7840	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
119	Farhan Hidayat, S.H.I.	08*****9235	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
120	Dela Sefiana, A.Md.	08*****2185	Akademi/ Diploma	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
121	Syaiful Anwar, S.Ag., M.HP.	08*****9922	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
122	Syaiful Anwar, S.Ag., M.HP.	08*****9922	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
123	Aisyah, S.Kom., M.H.	08*****6119	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
124	Abd. Rachman, S.H.	08*****2352	Akademi/ Diploma	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
125	Faesol Hasbi, S.E., S.H.	08*****1975	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
126	Ahmad Arifin Arfan, S.H.I., M.H.	08*****4009	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
127	Enggar Bagus Saputro, S.Kom.	08*****7933	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
128	Hilmy Azy Nurmansyah, S.H.	08*****2058	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
129	Rahman, S.H	08*****1944	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
130	Febry Emawan Dewata, S.H., M.H.	08*****0011	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
131	Trimo, S.H., M.H.	08*****7938	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
132	Imdad, S.H.I., M.H.	08*****1236	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
133	Sutji Eny Lestari, S.H.	08*****6938	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
134	Robi Noor Nafis Al Ghommy	08*****9966	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
135	Muhammad Ali Qoyyimuddin, S.H.I.	08*****5519	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
136	Agus Widyanto, S.H.I.	08*****0404	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
137	Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag.	08*****5578	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
138	Puspita Nur Astuti, S.E., M.H.	08*****2690	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
139	Hj. Nurul Islah, S.H.		Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
140	Siti Hanifah, S.Ag., M.H.	08*****6735	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
141	Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.	08*****8108	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
142	Kholid Hendra Irawan, S.H.	08*****8988	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
143	Heru Santoso, S.H.I.	08*****5252	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
144	Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.	08*****6663	Strata-3 (S3)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
145	Drs. Surib Wahyudi, S.H, M.H.	08*****7898	Strata-3 (S3)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
146	Aryl Zabarrespati, S.E.	08*****2989	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
147	Juminem, S.H., M.Hum.	08*****0238	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
148	Imran Saleh, S.H.	08*****7951	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
149	Imran Saleh, S.H.	08*****7951	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
150	Imran Saleh, S.H.	08*****7951	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
151	Imran Saleh, S.H.	08*****7951	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
152	Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.	08*****4177	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
153	Yunistira Fauziyah, S.H.I., M.H.	08*****0491	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
154	Novan Yahya Utama, S.Kom.	08*****7946	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
155	Muhammad Nafi', S.H., M.H.I	08*****0056	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
156	Drs. Solikin, S.H.,M.H.	08*****7017	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
157	Yeti Rianawati, S.H., M.H.	08*****0543	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
158	Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.	08*****0122	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
159	Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H.	08*****0018	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
160	Syamsudl Dluha, S.Kom., M.H.I.	08*****7001	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
161	Rachmad Firman Kristanto, S.Mn.	08*****1937	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
162	Achmad Fendi Suprasetyo, S.Si.	08*****4008	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
163	Aris Dwi Sutiyono, S.T.	08*****6268	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
164	Rusdi Isnani Yulkamsyah, S.H.I., M.H.	08*****6715	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
165	Achmad Chozin, S.H.	08*****6910	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
166	Dr. Toif, Drs., M.H.	08*****8822	Strata-3 (S3)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
167	Heri Fahrudin, S.H.	08*****7737	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
168	Drs. H. Ishadi, M.H.	08*****1641	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
169	M. Sa'dan, S.Ag.	08*****4589	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
170	Muslich, S.Ag., M.H.	08*****3431	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
171	Irwan Abd. Rahman, S.H., M.H.	08*****8743	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
172	H. Mashudi, S. Ag., M.H.	08*****8433	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
173	Fuad, S.H.I., M.H.	08*****2006	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
174	Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.	08*****6209	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
175	Hanim Makhsusiati, S.H.	08*****7915	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
176	Dyah Puspita Suningrum, S.H., M.H.	08*****9198	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
177	Nurlailia Isnawati, S.Akun.	08*****6016	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
178	Rizki Intan Maisaroh, A.Md.	08*****5144	Akademi/ Diploma	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
179	Antoni Windika, S.H.	08*****8775	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
180	Ipuk Rindiastuti, S.Kom.	08*****8896	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
181	Irawan Mahardika, S.Kom., M.H.	08*****9680	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
182	Tatang Winarto, S.Kom.	08*****6252	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
183	Tatang Winarto, S.Kom.	08*****6252	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
184	Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.	08*****3282	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
185	Eka Bakti Yani, S.Pd., S.H.	08*****4625	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
186	Ivana Rantansari, S.A.P.	08*****9196	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
187	Ricky Rizki Rahmawan, S.H.	08*****8807	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
188	Febriyanti Pratama, A.Md.	08*****6075	Akademi/ Diploma	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
189	Umi Rofiqoh, S.H., M.H.	08*****8769	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
190	Atiqotul Maula Alfariyah, S.Ag., M.H.	08*****9250	Strata-2 (S2)	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
191	Mohammad Ainur Rofiq, S.H.	08*****3634	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan
192	Mohammad Nidzam Fickry, S.H.	08*****0248	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
193	Sulaiman, S.H.	08*****8333	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
194	Sulaiman, S.H.	08*****8333	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
195	Sulaiman, S.H.	08*****8333	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
196	Sulaiman, S.H.	08*****8333	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
197	Amrulloh, S.H, M.H.	08*****2009	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
198	Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.	08*****5689	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
199	Shoheh, S.H.	08*****3026	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
200	Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.	08*****7886	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
201	Mundorin	08*****3963	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
202	Muhammad Sukamto	08*****7693	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
203	Aini	08*****6275	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Wanita	Karyawan Swasta	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan
204	Moh. Muhyidin, S.H.	08*****6971	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan Pengawasan
205	Mohammad Ainur Rofiq, S.H.	08*****3634	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan

1. Jenis Layanan

Pada periode triwulan III ini, sebagian besar responden adalah responden yang menggunakan layanan pembinaan sejumlah 78 orang (38,05%). Disusul dengan layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan sejumlah 63 orang (30,73%), layanan penyelesaian perkara sejumlah 50 orang (24,39%), dan layanan penyerahan produk pengadilan sejumlah 14 orang (6,83%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persentase
1	Layanan pembinaan dan pengawasan	78 orang	38,05%
2	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan	63 orang	30,73%
3	Layanan penyelesaian perkara	50 orang	24,39%
4	Layanan penyerahan produk pengadilan	14 orang	6,83%
Jumlah		205 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 7 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan

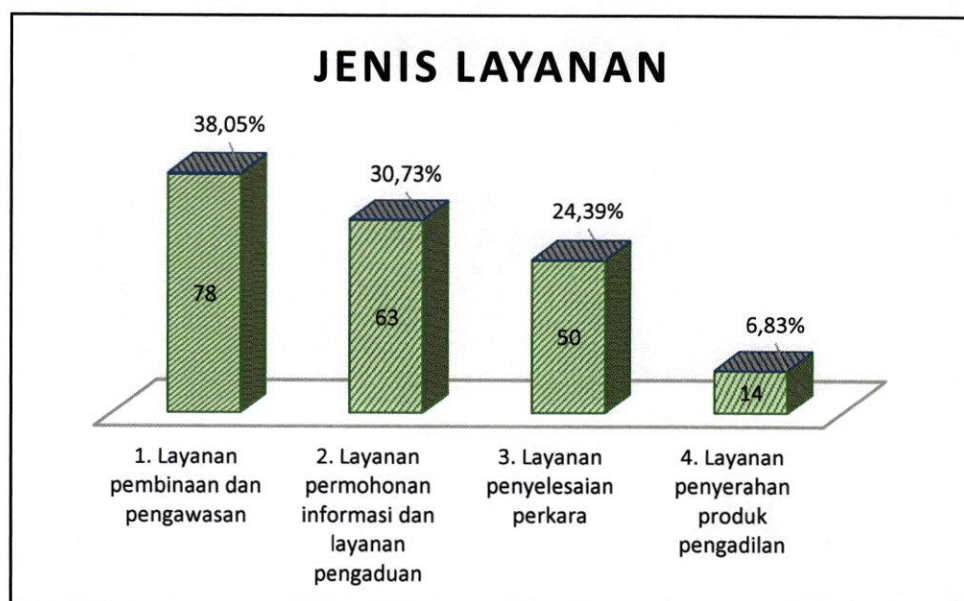
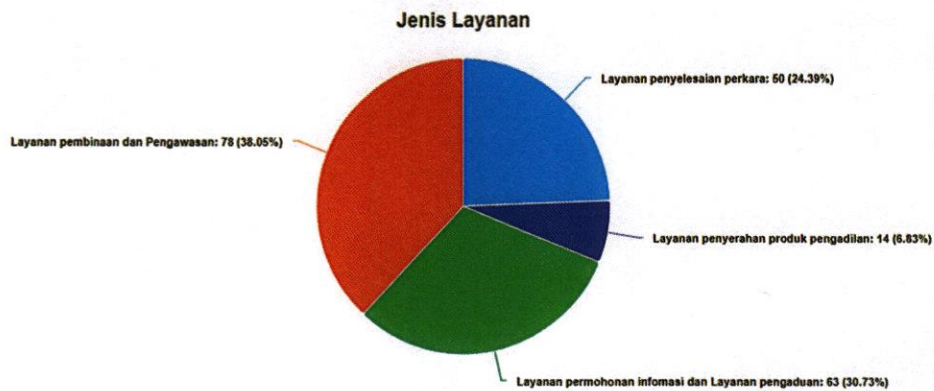


Diagram 1 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan



Jenis Layanan	
Jenis Layanan	Jumlah Responden
Layanan penyelesaian perkara	50
Layanan penyerahan produk pengadilan	14
Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan	63
Layanan pembinaan dan Pengawasan	78

2. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sejumlah 131 orang (63,90%) dan sisanya perempuan sejumlah 74 orang (36,10%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	131 orang	63,90%
2	Perempuan	74 orang	36,10%
Jumlah		205 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 8 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin

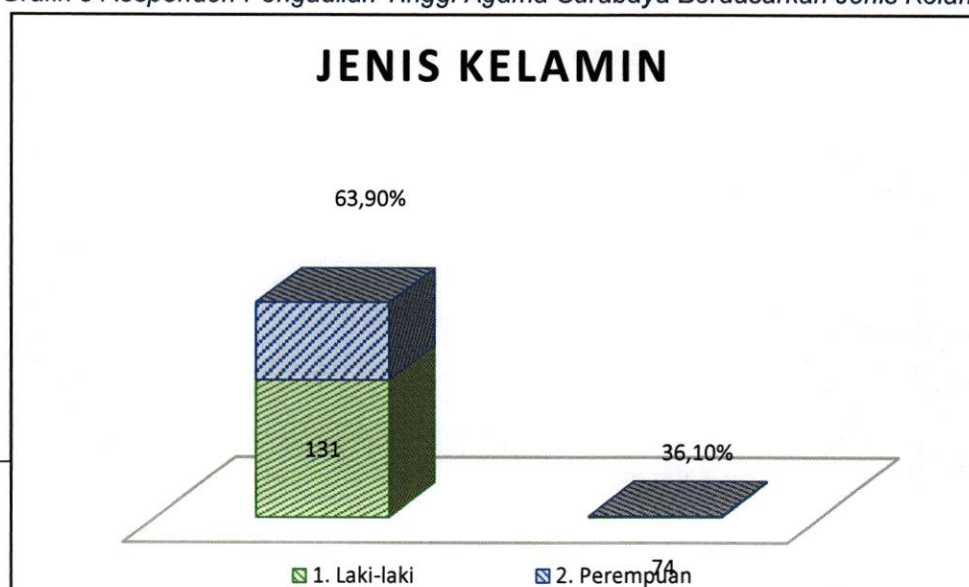
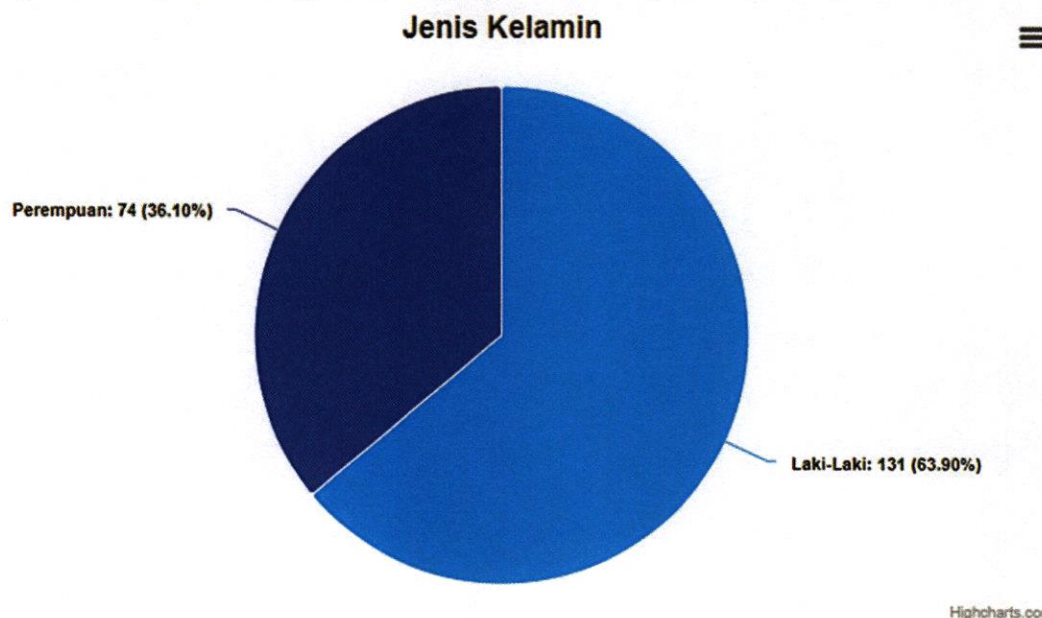


Diagram 2 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin



Jenis Kelamin	
Jenis Kelamin	Total
Laki-Laki	131
Perempuan	74

3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden berpendidikan Diploma IV/ Strata-1 (S1), yaitu sejumlah 101 orang (49,27%). Disusul dengan responden Strata-2 (S2) sejumlah 71 orang (34,63%), Akademi/ Diploma sejumlah 15 orang (7,32%), SMA/ SMK sederajat sejumlah 14 orang (6,83%), dan Strata-3 (S3) sejumlah 4 orang (1,95%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Strata-3 (S3)	4 orang	1,95%
2	Strata-2 (S2)	71 orang	34,63%
3	Strata-1 (S1)	101 orang	49,27%
4	Diploma (D1/D2/D3)	15 orang	7,32%
5	SLTA/ SMA/ Sederajat	14 orang	6,83%
Jumlah		205 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 9 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

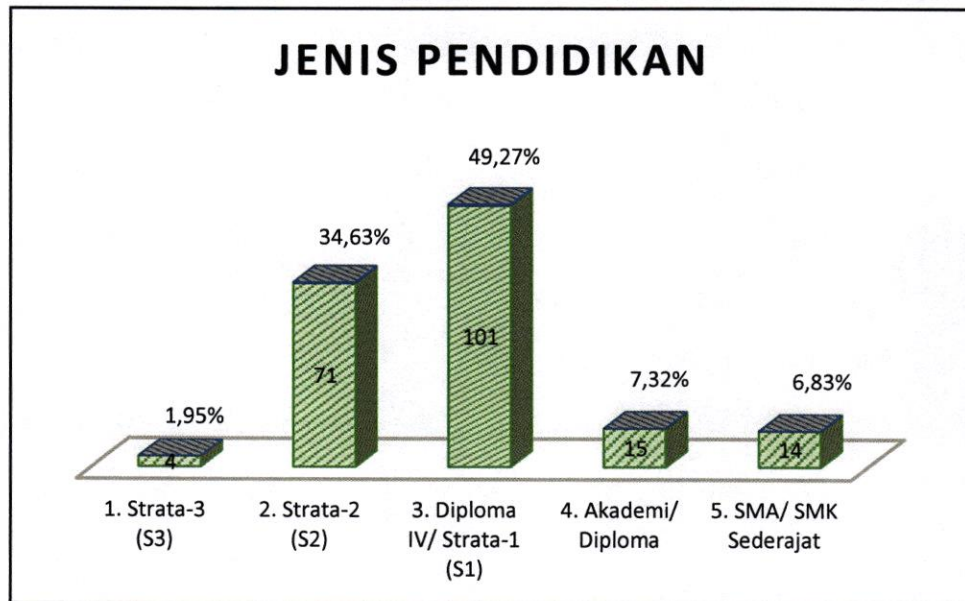
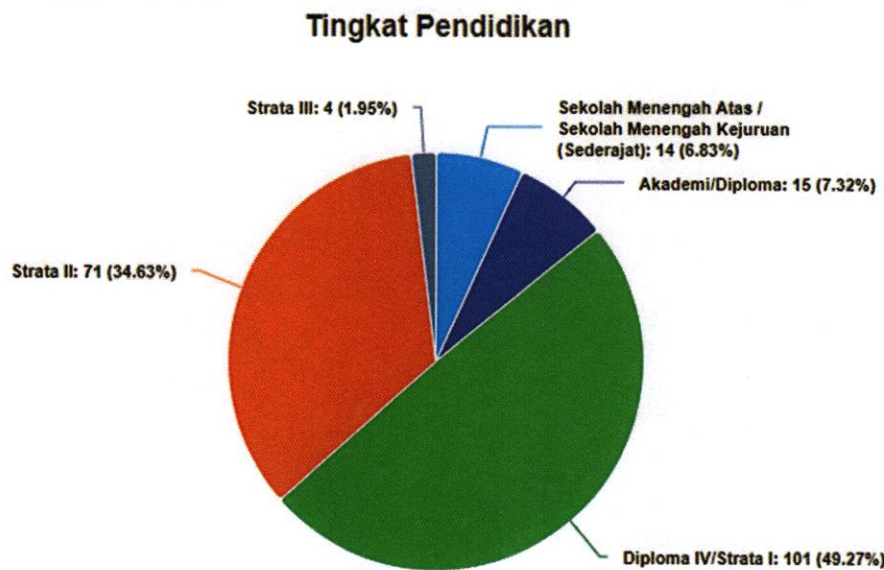


Diagram 3 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Highcharts.com

Tingkat Pendidikan	
Tingkat Pendidikan	Total
Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (Sederajat)	14
Akademi/Diploma	15
Diploma IV/Strata I	101
Strata II	71
Strata III	4

4. Pekerjaan

Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu sejumlah 182 orang (88,78%), karyawan honorer dan lainnya masing-masing sejumlah 4 orang (1,95%), karyawan swasta sejumlah 3 orang (1,46%). Disusul dengan responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan belum/ tidak bekerja masing-masing sejumlah 3 orang (1,46%). Selain itu, profesi pedagang dan mengurus rumah tangga masing-masing sejumlah 2 orang (0,98%). Sementara sisanya berprofesi sebagai karyawan BUMN, mekanik, industri, petani/ pekebun, dan pensiun masing masing sejumlah 1 orang (0,49%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 15 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	182 orang	88,78%
2	Karyawan honorer	4 orang	1,95%
3	Karyawan swasta	3 orang	1,46%
4	Karyawan BUMN	1 orang	0,49%
5	Pedagang	2 orang	0,98%
6	Mekanik	1 orang	0,49%
7	Industri	1 orang	0,49%
8	Petani/ Pekebun	1 orang	0,49%
9	Mengurus Rumah Tangga	2 orang	0,98%
10	Pensiun	1 orang	0,49%
11	Belum/ Tidak Bekerja	3 orang	1,46%
12	Lainnya	4 orang	1,95%
Jumlah		205 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 10 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

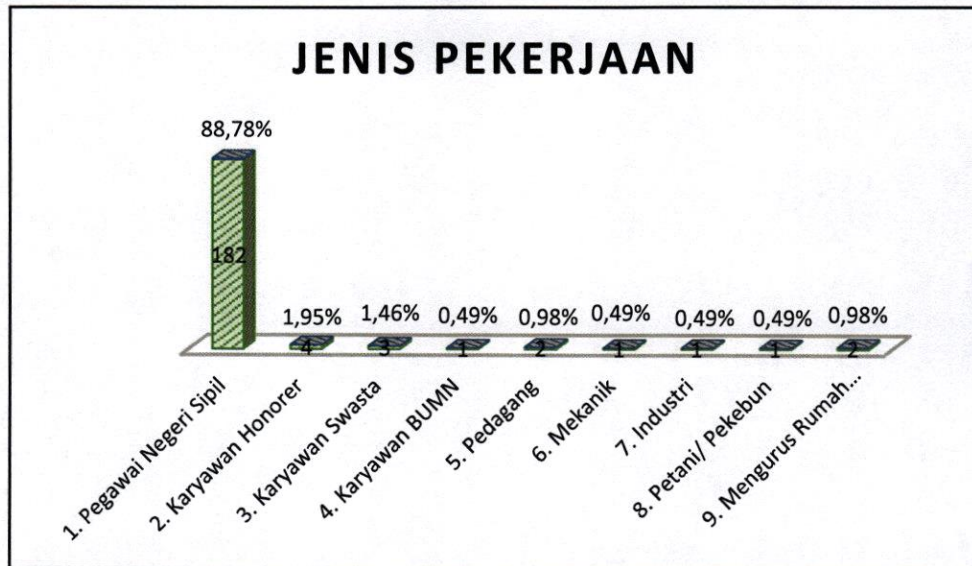
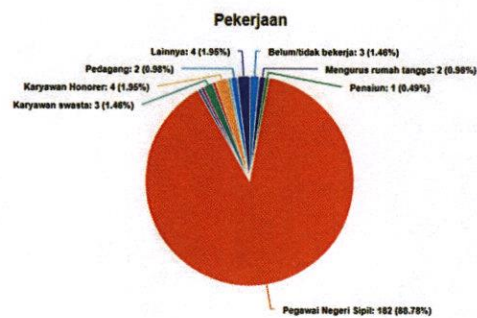


Diagram 4 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Pekerjaan	Total
Belum/tidak bekerja	3
Mengurus rumah tangga	2
Pensiun	1
Pegawai Negeri Sipil	182
Petani/pekebun	1
Industri	1
Karyawan swasta	3
Karyawan BUMN	1
Karyawan Honoror	4
Mekanik	1
Pedagang	2
Lainnya	4

B. Data dukung Lainnya

Berikut ini dilampirkan data dukung lainnya berupa tangkapan layar pada aplikasi Survelag Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Gambar 2 Data Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

DATA UNSUR SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode Triwulan 3 Tahun 2024

Total Responden : 205 INDEKS : 3.84

Copy CSV Excel Print			
NO	PERSEPSI ANTI KORUPSI	NILAI	MUTU
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3.84	Sangat Baik (A)
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3.83	Sangat Baik (A)
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	3.83	Sangat Baik (A)
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	3.85	Sangat Baik (A)
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit pelayanan ini	3.86	Sangat Baik (A)

STATISTIK SURVEI

Periode Triwulan 3 Tahun 2024


205
Data Responden


3.76
Indeks Kepuasan Masyarakat


3.78
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan


3.84
Indeks Persepsi Anti Korupsi

Data Detail Hasil Pengisian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
1	5	5	5	5	5	3
2	6	5	5	5	5	3,2
3	6	6	6	6	6	4
4	6	6	6	6	6	4
5	6	6	6	6	6	4
6	6	6	6	6	6	4
7	6	6	6	6	6	4
8	6	6	6	6	6	4
9	6	6	6	6	6	4
10	6	6	6	6	6	4
11	5	5	5	5	5	3
12	6	6	6	6	6	4
13	6	6	6	6	6	4
14	6	6	6	6	6	4
15	5	5	5	5	5	3
16	6	6	6	6	6	4
17	6	6	6	6	6	4
18	6	6	6	6	6	4
19	6	6	6	6	6	4
20	5	5	5	5	5	3
21	6	6	6	6	6	4
22	6	6	6	6	6	4
23	6	6	6	6	6	4
24	5	5	5	5	5	3
25	5	5	5	5	6	3,2
26	6	6	6	6	6	4
27	6	6	2	2	5	3
28	6	6	6	6	6	4
29	6	6	6	6	6	4
30	6	6	6	6	6	4
31	6	6	6	6	6	4
32	5	5	5	5	5	3
33	6	6	6	6	6	4
34	6	6	6	6	6	4
35	6	6	6	6	6	4
36	6	6	6	6	6	4
37	6	6	6	6	6	4
38	6	6	6	6	6	4
39	6	6	6	6	6	4
40	6	6	6	6	6	4
41	5	5	5	5	6	3,2
42	6	6	6	6	6	4
43	6	6	6	6	6	4
44	6	6	6	6	6	4
45	6	6	6	6	6	4
46	6	6	6	6	6	4
47	6	6	6	6	6	4
48	6	6	6	6	6	4

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
49	6	6	6	6	6	4
50	6	6	6	6	6	4
51	6	6	6	6	6	4
52	6	6	6	6	6	4
53	6	6	6	6	6	4
54	6	6	6	6	6	4
55	6	6	6	6	6	4
56	6	6	6	6	6	4
57	6	6	6	6	6	4
58	6	6	6	6	6	4
59	5	5	5	5	5	3
60	6	6	6	6	6	4
61	6	6	6	6	6	4
62	5	5	5	6	6	3,4
63	6	6	6	6	6	4
64	6	6	6	6	6	4
65	6	6	6	6	6	4
66	5	5	5	5	5	3
67	6	6	6	6	6	4
68	6	6	6	6	6	4
69	6	6	6	6	6	4
70	5	6	6	6	6	3,8
71	6	6	6	6	6	4
72	6	6	6	6	6	4
73	6	6	6	6	6	4
74	6	6	6	6	6	4
75	6	6	6	6	6	4
76	5	5	5	5	5	3
77	6	6	6	6	6	4
78	6	6	6	6	6	4
79	6	6	6	6	6	4
80	6	6	6	6	6	4
81	6	6	6	6	6	4
82	5	5	5	5	6	3,2
83	6	6	6	6	6	4
84	6	6	6	6	6	4
85	5	6	6	6	6	3,8
86	6	5	5	6	5	3,4
87	5	5	5	5	6	3,2
88	6	6	6	6	6	4
89	6	6	6	6	6	4
90	5	5	5	5	5	3
91	6	6	6	6	6	4
92	6	6	6	6	6	4
93	6	6	6	6	6	4
94	6	6	6	6	6	4
95	6	6	6	6	6	4
96	6	6	6	6	6	4
97	6	6	6	6	6	4
98	6	6	6	6	6	4
99	6	6	6	6	6	4

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
100	6	6	6	6	6	4
101	6	6	6	6	6	4
102	6	6	6	6	6	4
103	6	6	6	6	6	4
104	6	5	6	6	6	3,8
105	6	6	6	6	6	4
106	5	5	5	5	5	3
107	6	6	6	6	6	4
108	5	5	5	5	5	3
109	5	5	5	5	5	3
110	5	5	5	5	5	3
111	6	6	6	6	6	4
112	5	6	6	6	6	3,8
113	5	5	5	5	5	3
114	5	5	5	5	5	3
115	5	5	5	5	5	3
116	5	5	5	6	6	3,4
117	6	6	6	6	6	4
118	6	6	6	6	6	4
119	6	6	6	6	6	4
120	6	6	6	6	6	4
121	6	6	6	6	6	4
122	6	6	6	6	6	4
123	6	6	6	6	6	4
124	6	5	6	6	6	3,8
125	5	5	5	5	5	3
126	6	6	6	6	6	4
127	6	6	6	6	6	4
128	6	6	6	6	6	4
129	6	6	6	6	6	4
130	6	6	6	6	6	4
131	6	6	6	6	6	4
132	6	6	6	6	6	4
133	6	6	6	6	6	4
134	6	6	6	6	6	4
135	6	6	6	6	6	4
136	6	6	6	6	6	4
137	6	6	6	6	6	4
138	6	6	6	6	6	4
139	6	6	6	6	6	4
140	6	6	6	6	6	4
141	5	6	6	6	5	3,6
142	6	6	6	6	6	4
143	6	6	6	6	6	4
144	6	6	6	6	6	4
145	6	6	6	6	6	4
146	6	6	6	6	6	4
147	6	6	6	6	6	4
148	5	5	5	5	5	3
149	5	5	5	5	5	3
150	5	5	5	5	5	3

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
151	5	5	5	5	5	3
152	6	6	6	6	6	4
153	6	6	6	6	6	4
154	6	6	6	6	6	4
155	6	6	6	6	6	4
156	6	6	6	6	6	4
157	6	6	6	6	6	4
158	6	6	6	6	6	4
159	6	5	6	6	6	3,8
160	6	6	6	6	6	4
161	6	6	6	6	6	4
162	6	6	6	6	6	4
163	6	6	6	6	6	4
164	6	6	5	5	5	3,4
165	6	6	6	6	6	4
166	6	6	6	6	6	4
167	6	6	6	6	6	4
168	6	6	6	6	6	4
169	6	6	6	6	6	4
170	6	6	6	6	6	4
171	6	6	6	6	6	4
172	6	6	6	6	6	4
173	6	6	6	6	6	4
174	6	6	6	6	6	4
175	6	6	6	6	6	4
176	6	6	6	6	6	4
177	6	6	6	6	6	4
178	6	6	6	6	6	4
179	6	6	6	6	6	4
180	6	6	6	6	6	4
181	6	6	6	6	6	4
182	6	6	6	6	6	4
183	6	6	6	6	6	4
184	6	6	6	6	6	4
185	6	5	5	5	6	3,4
186	6	6	6	6	6	4
187	6	6	6	6	6	4
188	6	6	6	6	6	4
189	6	6	6	6	6	4
190	6	6	6	6	6	4
191	6	6	6	6	6	4
192	6	6	6	6	6	4
193	6	6	6	6	6	4
194	6	6	6	6	6	4
195	5	6	6	6	5	3,6
196	6	6	6	6	6	4
197	6	6	6	6	6	4
198	6	6	6	6	6	4
199	6	6	6	6	6	4
200	6	6	6	6	6	4
201	6	6	6	6	6	4

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
202	6	6	6	6	6	4
203	6	6	6	6	6	4
204	6	6	6	6	6	4
205	6	6	6	6	6	4
Total	1197	1196	1194	1197	1202	-
Jumlah Kuesioner	205	205	205	205	205	-
Rata - rata	3,84	3,83	3,83	3,85	3,86	-
Rata-rata x Bobot	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	-
Nilai Rata-rata Tertimbang IPAK Unit Pelayanan						3,84 96,05

Kesimpulan:

Nilai IPAK setelah dikonversi : 96,05

Mutu Pelayanan : A

Kinerja Unit Pelayanan : Bersih Dari Korupsi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dengan 205 responden yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki indeks persepsi anti korupsi, yaitu 3,84 atau 96,05 dan masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut terdiri dari 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks, sebagai berikut:

1. Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,84;
2. Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,83;
3. Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,83;
4. Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,85;
5. Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,86.

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi kualitas pelayanan pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan III Tahun 2024 (periode survei bulan Juli – September) di atas menunjukkan bahwa mayoritas memiliki indeks di atas 3,95 atau masuk pada mutu "**BERSIH DARI KORUPSI**". Namun, dari 5 (lima) unsur/ indikator tersebut menunjukkan bahwa terdapat indikator dengan indeks terendah, yaitu indikator pelayanan di luar prosedur dan permintaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku. Terhadap indikator dengan nilai tertinggi agar tetap dipertahankan hasil yang baik ini serta tetap selalu melakukan penguatan integritas seluruh unsur aparatur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya demi terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sementara terhadap indikator dengan nilai terendah agar tetap dipantau dan lebih ditingkatkan lagi.

LAMPIRAN

1. SK Tim Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
2. Surat Permohonan Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
3. Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Nomor: 2704/KPTA.W13-A/PS1.7/VI/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM), SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta dalam rangka peningkatan pelayanan mutu dan kelancaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menunjuk kembali Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2024;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang transparan dan akuntabel, serta untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan dan persepsi anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK);
 - d. Bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraam Megara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

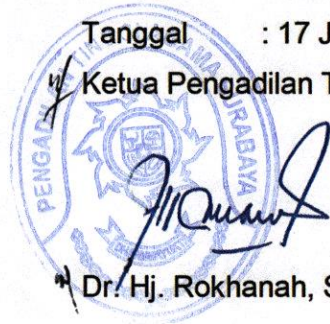
- Menetapkan : PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM), SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 1720/KPTA.W13-A/PS.1.7/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.**
- KEDUA : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.**
- KETIGA : Menugaskan kepada yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.**
- KEEMPAT : Menetapkan tugas-tugas Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang tersebut dalam lampiran II keputusan ini.**
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 17 Juni 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. The stamp contains the text 'PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H. ✓

Tembusan:

1. Yth. Plh. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Yth. Plh. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.; dan
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Lampiran I : Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor : 2704/KPTA.W13-A/PS1.7/VI/2024
Tanggal : 17 Juni 2024

**PENUNJUKAN TIMSURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM), SURVEI PERSEPSI
KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

NO.	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	
		DINAS	TIM
1	Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung
2	Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	Rusli, S.H., M.H.	Panitera	Pengarah
4	Dr. Naffi, S.Ag., M.H.	Sekretaris	
5	H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian	Ketua Tim
6	Benny Hardiyanto, S.H.	Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran	Sekretaris
7	Dhita Nova Widaningsih, S.Psi.	Perencana Pertama	Penyusun Laporan
8	Nur Sa'adah Muhammad, S.H.I.	Perencana Muda	
9	Ihdina Sabilal Haq, S.E.I.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Surveyor
10	Eka Siti Khomariyah, S.E.	Perencana Pertama	
11	Kartika Citraning Karwendyanto, S.Pd	Petugas PTSP	
12	Novera Intan Hapsari Suwarno Putri,. S.Sos.	Petugas PTSP	

Lampiran II : Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor : 2704/KPTA.W13-A/PS1.7/VI/2024
Tanggal : 17 Juni 2024

JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS
TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM), SURVEI PERSEPSI KUALITAS
PELAYANAN (SPKP), DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

NO.	JABATAN/ KEDUDUKAN	JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS
1.	Pelindung	Memberikan arahan dalam rangka kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
3.	Pengarah	a. Menyusun Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan jadwal survei; b. Menyiapkan materi <i>briefing</i> terhadap persiapan hingga pelaporan hasil survei.
4.	Ketua Tim	a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan survei; b. Memimpin tahapan pelaksanaan survei mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan penyajian/ pelaporan hasil survei; c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan survei; d. Menentukan responden; e. Melaporkan hasil kegiatan survei kepada Penanggung Jawab.
5.	Sekretaris	a. Membantu Ketua Tim b. Menyiapkan dan mengirimkan surat terkait pelaksanaan survei; c. Menatausahakan persuratan yang terkait dengan pelaksanaan survei.

NO.	JABATAN/ KEDUDUKAN	JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS
6.	Penyusun Laporan	Menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; Melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei.
7.	Surveyor	Menganalisis dan mengolah hasil survei.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 7, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis
Kota Surabaya, Jawa Timur 60225. www.pta-surabaya.go.id, ptasurabaya@gmail.com

Nomor : 4250/WKPTA.W13-A/OT1.6/IX/2024

Surabaya, 23 September 2024

Sifat : Penting

Hal : Permintaan Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan III Tahun 2024

Yth. Ketua Pengadilan Agama
se Jawa Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meminta kepada seluruh satuan kerja se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode Triwulan III (periode Juli s.d. September) tahun 2024 pada aplikasi Survelag yang dapat diakses melalui alamat link <https://bit.ly/SurveyPTASurabaya2024>;
2. Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terdiri dari 5 (lima) orang responden yang pernah menggunakan layanan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
3. Pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud agar diisi secara lengkap paling lambat pada hari Jumat, tanggal **27 September 2024**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Rokhanah

Publikasi Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TRIWULAN III TAHUN 2024

NILAI IPAK

3,84

NILAI INTERVAL KONVERSI

96,05

RESPONDEN

Jumlah : 205 orang
Jenis Kelamin : L: 131/P: 74

Pendidikan
Strata-3 : 4 orang
Strata-2 : 71 orang
Diploma IV/Strata-1 : 101 orang
Diploma (D1/D2/D3) : 15 orang
SLTA/SMA/Sederajat : 14 orang

Periode Survei Juli s.d. September 2024

SURVEY DILAKUKAN UNTUK MENJARING MASUKAN DARI RESPONDEN BERKAITAN DENGAN UPAYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MEMINIMALISIR CELAH KORUPSI
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TRIWULAN III TAHUN 2024

NILAI INDEKS PADA INDIKATOR

NO	RUANG LINGKUP/INDIKATOR	NILAI	MUTU PELAYANAN
1.	<u>Diskriminasi Pelayanan</u>	3,84	<u>Bersih dari Korupsi</u>
2.	<u>Pelayanan di Luar Prosedur</u>	3,83	<u>Bersih dari Korupsi</u>
3.	<u>Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku</u>	3,83	<u>Bersih dari Korupsi</u>
4.	<u>Pungutan Liar</u>	3,85	<u>Bersih dari Korupsi</u>
5.	<u>Percaloan/ Perantara</u>	3,86	<u>Bersih dari Korupsi</u>

SURVEY DILAKUKAN UNTUK MENJARING MASUKAN DARI RESPONDEN BERKAITAN DENGAN UPAYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MEMINIMALISIR CELAH KORUPSI
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA